

**PENGEMBANGAN SEKOLAH BERBASIS MASYARAKAT:  
REFLEKSI PENGALAMAN DI MI MUHAMMADIYAH PROGRAM KHUSUS**

**COMMUNITY-BASED SCHOOL DEVELOPMENT:  
REFLECTION OF EXPERIENCES AT MI MUHAMMADIYAH SPECIAL PROGRAM**

**Sri Sumarti<sup>1</sup>**  
atikkgt@gmail.com

**Mohamad Ali<sup>2</sup>**  
ma122@ums.ac.id

**Abstrak**

Salah satu fenomena Pendidikan di Indonesia adalah kecenderungan lepasnya tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan dan terciptanya Lembaga pendidikan dari akar social-kemasyarakatan. Pendidikan berbasis masyarakat merupakan pendidikan yang dirancang oleh masyarakat untuk membelajarkan masyarakat sehingga mereka berdaya, dalam arti memiliki kekuatan untuk membangun dirinya sendiri melalui interaksi dengan lingkungannya. Pendidikan berbasis masyarakat merupakan usaha pemberdayaan (empowering) masyarakat dalam pendidikan. Untuk memberikan nafas baru bagi madrasah. Salah satunya adalah dengan melakukan penambahan nama "Program Khusus" pada nama Madrasah. Peran masyarakat dalam pengembangan Madrasah yaitu Pembentukan team pengembang, membentuk komite sekolah, membentuk badan pemeriksa harian. Untuk mewadahi peningkatan potensi guru, Kepala Madrasah memberikan wadah berupa Teacher Study Club yang diadakan setiap hari Sabtu minggu keempat.

**Kata Kunci :** *Program Khusus, Pengembangan Sekolah Berbasis Masyarakat, Muhammadiyah*

---

1 Universitas Muhammadiyah Surakarta

2 Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Abstract**

*One of the phenomena of education in Indonesia is the tendency to let go of public responsibility for education and the creation of educational institutions from social-community roots. Community-based education is education designed by the community to teach people so that they are empowered, in the sense of having the power to build themselves through interaction with their environment. Community based education is an effort to empower the community in education. To give a new breath to madrasah. One of them is by adding the name "Special Program" to the name of the Madrasah. The role of the community in the development of Madrasahs is the formation of a development team, the formation of a school committee, and the establishment of a daily audit board. To accommodate the improvement of teacher potential, the principal provides a forum in the form of the Teacher Study Club which is held every fourth Saturday of the week.*

**Keywords:** *Special Program, Community Based School Development, Muhammadiyah*

**A. PENDAHULUAN**

Di dalam amandemen UU No. 22 Tahun 2003 tentang Otonomi Daerah dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya masing-masing. Dari fenomena inilah menjadi kesempatan bagi semua masyarakat untuk berperan aktif dalam memajukan daerahnya masing-masing yang menyangkut berbagai bidang, salah satu diantaranya adalah bidang pendidikan.

Kebijakan Desentralisasi dianggap sebagai persoalan manajemen, karena itu keputusan Desentralisasi Administratif apakah dapat dilaksanakan di luar Departemen atau Pemerintah secara keseluruhan, tanpa konsultasi yang ekstensif. Desentralisasi politik melibatkan beragam stakeholder, baik mereka yang ada di dalam maupun di luar pemerintah. Mereka semua memiliki kepentingan untuk melindungi atau mencapainya.<sup>3</sup>

Referensi inilah yang dijadikan sebagai acuan oleh masyarakat dalam menginovasi lembaga pendidikan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam memajukan dunia pendidikan di daerahnya masing-masing.

Munculnya lembaga pendidikan berbasis masyarakat merupakan hasil kreasi dari masyarakat dalam upaya mencari bentuk idealisme dari lembaga pendidikan yang mampu menjadi solusi dari problematika dunia pendidikan di masa kini.

---

<sup>3</sup> Ibtisam Abu Duhou, *Manajemen Berbasis Sekolah*, terjemah Nur Yamin Aini dan Suparto (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2002) hal. 13

Pendidikan berbasis masyarakat dianggap sebagai suatu keputusan yang bijak dan demokratis, karena pendidikan berbasis masyarakat merupakan pendidikan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Dengan adanya pendidikan yang berbasis masyarakat maka masyarakat dituntut lebih proaktif dalam mensukseskan proses pelaksanaannya.

Sebagaimana kita ketahui bahwasanya sekolah merupakan Laboratorium masyarakat, sehingga adanya sekolah di dalam masyarakat diharapkan mampu menjadi solusi segala problematika yang ada di masyarakat. Di dalam sekolahlah proses pendidikan formal terjadi, maka pada proses pendidikan itulah proses transformasi budaya terjadi, sehingga sekolah menjadi ikon transformator yang strategis dalam dinamika masyarakat.

Bila secara spesifik kita pahami tentang tujuan pendidikan, maka tujuan pendidikan ada 2 item terkait dengan kedudukan individu sebagai individu dan individu sebagai anggota masyarakat. Sebagai seorang individu dia diharapkan mampu mengembangkan segala kemampuan dan potensi yang dimilikinya, adapun sebagai anggota masyarakat, diharapkan kelak ketika dewasa mampu bertingkah laku, berbuat dan hidup dengan baik sesuai dengan norma dan nilai masyarakat.<sup>4</sup>

Selama ini, hubungan antara pendidikan dan masyarakat dapat dilihat dari sifat pendidikan, yaitu; pertama, pendidikan diarahkan untuk pengembangan pribadi anak agar sesuai dengan nilai-nilai masyarakat yang baik. Kedua pendidikan diarahkan untuk menyiapkan anak dalam menjalankan kehidupan di masyarakat sesuai dengan kewajiban, hak dan norma yang berlaku di masyarakat. Pendidikan membutuhkan dukungan dari masyarakat, berupa penyediaan fasilitas, sistem sosial, budaya dan lain-lain, karena disini masyarakat diposisikan sebagai suatu sub sistem yang ikut mensukseskan pelaksanaan proses pendidikan.

Berikut ini merupakan kajian teori Pendidikan berbasis masyarakat:

### **1. Pendidikan Berbasis Masyarakat**

Pendidikan berbasis masyarakat (*Community based education*) adalah sebuah model pendidikan yang mengikut sertakan masyarakat di dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, maka pendidikan tersebut berakar dari masyarakat dan di dalam kebudayaan. Dengan demikian lembaga-lembaga

---

<sup>4</sup> S.Nasution, *Asas-Asas Kurikulum:Teori dan Praktek* (Bandung:Jemars, 1990) hal. 24

pendidikan yang berfungsi untuk membudayakan nilai-nilai masyarakat, dapat memenuhi fungsinya.<sup>5</sup>

Pendidikan berbasis masyarakat merupakan pendidikan yang dirancang oleh masyarakat untuk membelajarkan masyarakat sehingga mereka berdaya, dalam arti memiliki kekuatan untuk membangun dirinya sendiri yang sudah barang tentu melalui interaksi dengan lingkungannya. Dengan demikian konsep pendidikan berbasis masyarakat mencakup : Dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.<sup>6</sup>

Pendidikan berbasis masyarakat menekankan pada pentingnya pemahaman akan kebutuhan masyarakat dan cara pemecahan masalah oleh masyarakat dengan menggunakan segala potensi yang ada dalam masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya.

Dalam UU sistem pendidikan nasional (UU SISDIKNAS) No 20 Tahun 2003 pasal 55 telah diuraikan beberapa kerangka pengembangan pendidikan berbasis masyarakat. Pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

Dengan demikian masyarakat memiliki peluang dan hak dalam membangun system pendidikan yang khas dengan kebutuhan lokal. Pendidikan berbasis masyarakat tersebut dapat dibentuk melalui jalur formal maupun nonformal sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjadikan manusia seutuhnya. Pemerintah dalam hal ini sebagai fasilitator yang turut membantu memberikan pertimbangan dan masukan bagi pelaksanaan program-program yang dikembangkan.

Pada poin 2 pasal 55 UU SISDIKNAS telah dijelaskan tentang kurikulum, evaluasi dan pembiayaan. Disebutkan bahwa pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. Lebih lanjut terkait dengan pendanaan juga dijabarkan pada point 3 bahwa dana Penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari

---

5 H.A.R Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000) hal.175

6 Umberto Sihombing, *Konsep dan Pengembangan Pendidikan berbasis masyarakat* (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001) hal. 186

penyelenggara, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, dan atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat juga dapat memperoleh bantuan teknis, Subsidi dana, dan sumber daya lain yang adil dan merata dari pemerintah dan atau pemerintah daerah, (Poin 4 pasal 55 UU SISDIKNAS).

## **2. Tujuan Pendidikan Berbasis Masyarakat**

Pendidikan berbasis masyarakat lebih diarahkan untuk membentuk disposisi mental dan emosional, mensosialisasikan pemaknaan dan mengajarkan peserta didik ilmu pengetahuan sebagai strategi dalam menyongsong masa depan. Pendidikan berbasis masyarakat tidak hanya menuntut adanya keterlibatan dan peran aktif masyarakat, tetapi hasil dari penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan di tuntut untuk mampu memecahkan berbagai macam problematika masyarakat.<sup>7</sup>

Tujuan pendidikan berbasis masyarakat adalah untuk mengembangkan kualitas pendidikan yang memberikan wewenang pada masing-masing masyarakat atau sekolah. Negara tetap memiliki tanggung jawab yang utama terhadap pendidikan, tetapi masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang akan mempengaruhi kebijakan sekolah, Khususnya dalam upaya pemberdayaan siswa.

Dalam hasil-hasil pertemuan kelompok kerja (POKJA) mengenai pendidikan berbasis masyarakat yang dikutip oleh Fasli jalal dan Dedi Supriyadi dalam buku yang berjudul Reformasi pendidikan dalam konteks otonomi daerah, telah merumuskan tujuan dari pendidikan berbasis masyarakat yang antara lain sebagai berikut:

- a) Membantu pemerintah dalam memobilisasi sumberdaya lokal dan meningkatkan peranan masyarakat untuk mengambil bagian yang lebih besar, dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan pada semua tingkat, jenis dan jalur pendidikan.

---

<sup>7</sup> Bagong Suyanto, Pendidikan *Berbasis Masyarakat: Prasyarat yang Dibutuhkan Edukasi*, Vol I, No 1 (2005) hal. 11

- b) Merangsang terjadinya perubahan sikap dan persepsi tentang ras kepemilikan masyarakat terhadap sekolah, rasa tanggung jawab, kemitraan toleransi dan kekuatan multikultural.
- c) Mendukung prakarsa pemerintah dalam meningkatkan dukungan masyarakat terhadap sekolah, khususnya orang tua dan masyarakat melalui kebijakan desentralisasi.
- d) Mendukung peranan masyarakat untuk mengembangkan inovasi kelembagaan untuk melengkapi, meningkatkan dan mengganti peran persekolahan dan untuk meningkatkan mutu dan relevansi, penyediaan akses yang lebih besar. Peningkatan efisiensi manajemen pendidikan dasar untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- e) Membantu mengatasi putus sekolah khususnya dari pendidikan dasar.<sup>8</sup>

Pada poin 5 dari tujuan pendidikan berbasis masyarakat diatas telah dirumuskan bahwa salah satu tujuan pendidikan berbasis masyarakat adalah membantu mengatasi putus sekolah khususnya dari pendidikan sekolah dasar, karena sampai saat ini angka anak putus sekolah masih belum bisa diminimalisir secara maksimal, pada konteks ini maka pendidikan berbasis masyarakat mencoba mnyuguhkan solusi dari problematika tersebut.

Banyaknya anak putus sekolah dikarenakan tuntutan ekonomi, sudah menjadi fakta yang miris untuk diperdengarkan karena pada saat ini di kota-kota besar, seperti halnya Surabaya masih banyak anak yang putus sekolah karena memang mereka sudah dituntut untuk bekerja mencari uang untuk membantu menafkahi keluarga.

Faktor lain yang menyebabkan banyaknya anak putus sekolah adalah mental dari para orang tua mereka yang kurang sadar akan pentingnya pendidikan sehingga mereka tidak memberikan motivasi pada anak-anaknya untuk melanjutkan pendidikannya dan cenderung membiarkan para anak mereka bekerja.

Bila dikritisi secara lebih menyeluruh mengenai tujuan dari pendidikan berbasis masyarakat maka pendidikan ini mencoba memberikan formulasi

---

8 Fasli Jalal dan Dedi Supriyadi, *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001) hal. 200

pendidikan yang solutif terhadap problematika pendidikan yang kompleks dan heterogen.

### **3. Karakteristik Pendidikan Berbasis Masyarakat**

Bila membicarakan masalah karakteristik pendidikan berbasis masyarakat maka proses pendidikan ini memiliki karakteristik yang syarat akan masyarakat, karena pendidikan ini merupakan pendidikan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Ada beberapa kriteria yang menjadi karakteristik dari pendidikan berbasis masyarakat. Yang diantaranya adalah:

Peran serta masyarakat dalam pendidikan; Pengambilan keputusan yang berbasis sekolah; Pendidikan yang diberikan oleh sekolah swasta dan yayasan; Pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh pusat pelatihan milik swasta; Pendidikan luar sekolah yang disediakan oleh pemerintah; Pusat kegiatan belajar masyarakat; Pendidikan luar sekolah yang diberikan oleh organisasi akar rumput seperti LSM dan pesantren.<sup>9</sup>

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan berbasis masyarakat sangatlah penting, karena peran masyarakat ini akan memberikan warna tersendiri pada corak pendidikan berbasis masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung pada proses pendidikan ini, maka masyarakat juga merasa ikut memiliki dan bertanggung jawab atas kesuksesan dari proses pendidikan tersebut. Sanapiah Faisal berpendapat bahwa praktek pendidikan bukanlah merupakan fenomena yang terpisah dari pranata lainnya, apalagi masyarakat yang ada di sekitarnya, semua bidang atau pranatanya bernaung di bawah satu sistem yang sama. Itulah sistem pendidikan yang sesuai yang diterapkan pada era saat ini. Setiap masyarakat memiliki sistem moral, agama, ekonominya sendiri dan lain sebagainya.<sup>10</sup>

Pendidikan berbasis masyarakat merupakan usaha pemberdayaan (empowering) masyarakat dalam pendidikan. Pada statmen ini tergambar jelas bahwa pendidikan berbasis masyarakat ingin menjadikan masyarakat menjadi lebih berdaya, yang dimaksud dengan berdaya di sini adalah masyarakat mampu mengatasi segala permasalahan hidup dengan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang telah dimilikinya dari proses pendidikan.

---

<sup>9</sup> Dean Nielsen, Memetakan Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat di Indonesia (Yogyakarta: Adicita Karyanusa, 2001) hal. 175-176

<sup>10</sup> Sanapiah Faisal, Sosiologi Pendidikan, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980) hal. 242

#### **4. Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Berbasis Masyarakat**

Peran serta masyarakat terhadap pengembangan konsep pendidikan berbasis masyarakat dapat dilihat melalui beberapa kriteria, yang antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Peran serta masyarakat tidak hanya berwujud pemberian bantuan uang atau fisik, tetapi juga hal-hal akademik.
- b) Kewajiban sekolah (disertai memonitoring dan accountability) yang tinggi terhadap pemerintah maupun masyarakat
- c) Memberi kesempatan luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lembaga pendidikan termasuk dalam partisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan
- d) Program sekolah disusun dan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan tujuan pendidikan, bukan hanya untuk kepentingan administratif atau birokrasi.
- e) Program pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat baik sekarang maupun mendatang, berorientasi pada peningkatan mutu bukan untuk kepentingan birokrasi.
- f) Laporan pertanggung jawaban terbuka untuk semua pihak yang berkepentingan.<sup>11</sup>

Dari beberapa kriteria peran serta masyarakat dalam proses pendidikan berbasis masyarakat diatas tergambar jelas bahwa masyarakat memiliki posisi yang urgen dalam keberlangsungan melaksanakan pendidikan berbasis masyarakat, dan peran serta yang dapat diambil oleh masyarakat tidak hanya sebagai donatur sekolah tetapi juga meliputi kebijakan-kebijakan yang akan di ambil oleh sekolah tersebut dalam pelaksanaan pendidikan tersebut.

#### **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti kondisi objek yang dialami (sebagai lawanya

---

11 A.S.Haris, *Pengembangan Sekolah Melalui Partisipasi Masyarakat: Sebuah Kajian Operasional Tingkat Sekolah*. (Seminar Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta), 19 Mei 2001.



adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara secara purposive dan snowboal, teknik pengambilan data Trianggulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generasi.<sup>12</sup>

Dalam menemukan kebenaran terhadap masalah yang dikemukakan, maka untuk memperoleh data yang akurat ditempuh dua acara, yaitu *library reseach* (penelitian kepustakaan) dan *field research*. *library reseach*, mengumpulkan dan membaca buku buku yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas serta megutip beberapa buku tentang metode pembelajaran yang berkaiatan degan kajian tersebut.<sup>13</sup> Field research (Penelitian lapangan), turun ke lokasi penelitian untuk memperoleh data – data kongkrit mengenai masalah yang akan dibahas melalui obsrvasi, interview dan dokumentasi.<sup>14</sup>

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Profil Madrasah

MI Muhammadiyah Program Khusus Kateguhan adalah sebuah madrasah Muhammadiyah yang terletak di Desa Kateguhan, Sawit, Boyolali. Madrasah ini merupakan Madrasah tua yang sudah berdiri sejak tahun 1965. MI Muhammadiyah Program Khusus Kateguhan berkembang sangat dinamsi, mengikuti perubahan zaman, dan tentunya perubahan legitimasi. Hingga pada akhirnya sampailah perjalanan madrasah ini pada perubahan management yang berlaku sekarang ini.

Madrasah ini saat ini memiliki jumlah siswa sebanyak 226 anak. Jumlah guru yang mengajar sejumlah 17 guru. Jumlah karyawan yang ada sebanyak 3 orang. Dengan potensi SDM yang demikian, beberapa prestasi telah dicapai oleh madrasah ini. Pencapaian prestasi telah diwujudkan dalam berbagai bidang, baik kognitif maupun pengemabangan minat bakat anak. Dari sisi kognitif, madrasah ini telah beberapa kali meraih nilai UN tertinggi ditingkat Kabupaten. 3 tahun terakhir ini selalu mendapatkan peringkat 1 se-Kabupaten Boyolali. Bahkan pada tahun 2015, pernah meraih juara 2 nilai UN tertinggi ditingkat provinsi Jawa tengah.

---

12 Sugiyono, Metode Pendidikan ( Pendekatan Kualitatif, Kualiatiaf dan R & D ) Alfabeta, 2008.

13 Ibid.

14 Yatim Riyanto, Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif. Surabaya: Unesa University Press, 2007.

Prestasi diluar akademik telah banyak sekali dicapai. Dibidang olahraga telah berhasil menjuarai lomba Panahan dan Tapak suci tingkat Kabupaten Boyolali. Bidang keagamaan yaitu Tahfidz telah menjuarai beberapa lomba ditingkat karisidenan Surakarta. Dibidang teknologi telah berhasil mencapai prestasi nasional sebagai juara 3 lomba Robotik Kemenag di Jakarta pada tahun 2018. Pencapaian prestasi tersebut didukung dengan adanya berbagai kegiatan ekstra kurikuler dimadrasah. Diantaranya adalah tapak suci, panahan, dan sepak bola. Dibidang seni ada ekstra kurikuler Menari, Drumband dan Kaligrafi. Dibidang pengetahuan dan Teknologi ada Saince and Math dan Robotik.

Perkembangan sekolah tentu memerlukan dukungan Team pengembang yang kuat. Team yang memiliki loyalitas, totalitas serta visi misi yang sama dalam memajukan sekolah. Dengan 17 guru dengan berbagai latar belakang pendidikan madrasah ini mampu bergerak secara progresive. Kepala Madrasah sebagai leader, manager, motivator, inovator, supervisor, harus mampu menciptakan suasana kerja yang sehat, bersemangat dan hangat. Kepala madrasah menjadi salah satu barometer kemajuan madrasah itu sendiri.

## **2. Peran Masyarakat pada Madrasah**

Sejarah pahit pernah dialami oleh madrasah ini pada tahun 2007. Madrasah hanya memiliki total jumlah siswa sebanyak 70 anak, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Saat itulah tonggak sejarah mulai ditancapkan oleh pengelola madrasah, yaitu yayasan yang berusaha mempertahankan keberlangsungan madrasah. Berbagai macam cara dilakukan untuk memberikan nafas baru bagi madrasah. Salah satunya adalah dengan melakukan penambahan nama “Program Khusus” pada nama madrasah. Nama madrasah yang semula adalah Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kateguhan berubah menjadi Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Program Khusus Kateguhan. Penambahan nama ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap daya tarik masyarakat. jumlah pendaftar kelas satu meningkat menjadi 21 anak. Satu tahun berjalan dengan nama branding yang baru. Akan tetapi perjalanan tidak mulus seperti yang dibayangkan. Program khusus mengalami kegagalan karena tidak adanya persamaan visi misi dalam internal madrasah. Program Khusus melempem dan sulit berjalan. Adanya penambahan nama branding tidak diimbangi dengan perubahan mindset guru. Guru tercerai berai pada persepsi

masing-masing tanpa ada pengelolaan dan pengontrolan. Apa yang dicita-citakan tidak berhasil diwujudkan.

Bentuk peran masyarakat dalam pengembangan MI Muhammadiyah Program Khusus Kateguhan, diantaranya: Pembentukan Team Pengembang, Membentuk Komite Sekolah. Menurut UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa komite sekolah terdiri atas unsur: orang tua siswa, wakil tokoh masyarakat (bisa Ulama atau Rohaniwan, Budayawan, Pemuka adat, Pakar atau Pemerhati pendidikan, wakil organisasi masyarakat, wakil dunia usaha dan industri, bahkan kalau perlu juga wakil siswa, wakil guru-guru, dan Kepala Madrasah.

Tugas utama komite sekolah ialah membantu penyelenggaraan pendidikan di sekolah dalam kapasitasnya sebagai pemberi pertimbangan, pendukung program, pengontrol, dan bahkan mediator. Untuk memajukan pendidikan di sekolah, komite sekolah membantu sekolah dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar, manajemen sekolah, kelembagaan sekolah, sarana dan prasarana sekolah, pembiayaan pendidikan, dan mengkoordinasikan peran serta seluruh lapisan masyarakat. Kedudukannya sebagai mitra sekolah: Membentuk badan pemeriksa harian, Pemberian donatur tetap dan tidak tetap, hal ini pemberian bantuan dalam bentuk : Memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga, misalnya dalam pembangunan gedung sekolah Finansial; Keahlian; Tenaga, dan lain-lain.

### **3. Management Berbasis Madrasah**

Pergantian Kepala Madrasah terjadi secara periodik setiap 4 tahun sekali. Bisa dipilih kembali apabila kinerja bagus, hingga dua periode kepala madrasah lama kini tiba masa habisnya perodesasi dan diganti dengan kepala madrasah baru.

Dalam mengembangkan MI Muhammadiyah Program Khusus Kateguhan ditahun awal, Kepala Madrasah terpilih menggunakan prinsip-prinsip Management Berbasis Sekolah (MBS). Ia melihat potensi yang ada, kemudian dikembangkan sesuai dengan visi misi madrasah. Kepala Madrasah melakukan analisis kekuatan yang dimiliki oleh Madrasah. Potensi tersebut antara lain SDM guru, siswa, orang tua murid.

1). Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Guru

Guru MI Muhammadiyah Program Khusus Kateguhan pada dasarnya adalah guru-guru yang memiliki semangat tinggi dan bekerja keras. Hanya beberapa saja yang memiliki pola pikir lama dan susah beradaptasi. Menerima kelemahan SDM ini menjadi penyemangat bagi kepala madrasah untuk dapat terus berjalan beriringan. Dengan bersikap “*The right man in the right place*” ia dapat membaca potensi masing-masing guru untuk dapat dikembangkan. Untuk memperkuat posisi guru, kepala sekolah mengadakan rekrutmen guru baru. Sengaja dipilih guru-guru muda agar kompetensi yang diharapkan oleh Kepala Madrasah pada seorang guru dapat terpenuhi. Diantaranya adalah memiliki kemampuan IT yang bagus, bersikap sosial, visioner, kreatif dan memiliki potensi unggul.

Kepala madrasah melakukan pemetaan terhadap potensi guru. Hasil pemetaan ini dipakai dalam pembagian *Job Description* yang harus dijalankan dilapangan. MI Muhammadiyah Program Khusus Kateguhan ini memiliki 5 wakil kepala yang selalu memberika dukungan pada kepala madrasah dibidangnya masing-masing. diantaranya adalah Waka Kurikulum, Waka Sarpras, Waka Kesiswaan, Waka Al Islam dan Kemuhammadiyah serta Waka Humas. Waka memiliki tugas pokok masing-masing. Waka akan berkoordinasi dengan Kepala Madrasah secara terjadwal untuk membahas tentang program kerja masing-masing, Pelaksanaannya serta evaluasi programnya. Dengan adanya waka, kepala madrasah sangat terbantu karena pembagian kerja yang jelas pada masin-masing bidang, sehingga akan terukur kemajuan dan kelemahannya. Dengan demikian kepala madrasah mampu mengontrol dan mengendalikan roda perjalanan madrasah agar sesuai pada apa yang dicita-citakan.

Selain Waka, Kepala Madrasah membentuk pimpina harian yang terdiri dari Kepala Madrasah, Wakil Kepala Madrasah dan Bendahara Madrasah. Pimpinan harian ini adalah team inti yang harus selalu mengetahui seluk beluk perjalanan madrasah. Koordinasi yang dilakukan bersifat dinamis. Fungsi pimpinan harian ini adalah sebagai partner kerja terdekat Kepala Madrasah dalam mengatasi segala permasalahan sekolah. MI Muhammadiyah Program Khusus Kateguhan memiliki tagline yang berbunyi “Beriman dan Berprestasi”. Tagline ini bertujuan menyamakan langkah para guru, siswa dan orang tua agar setiap apa yang

dilakukan selalu mengarah pada iman dan prestasi. Iman menjadi hal yang nomor satu. Iman menjadi sumber utama setiap kegiatan belajar mengajar di madrasah ini. Semua hal dilandaskan pada iman. Setelah iman dipegang baru prestasi diraih. Kehidupan diakhirat harus didahulukan daripada kehidupan di dunia. Berbakti pada Allah lebih utama daripada menjunjung tinggi hal-hal yang bersifat duniawi.

Tidak semua guru memiliki potensi yang bagus dan bisa dikembangkan. Kendala utama adalah masalah intern yang berkaitan dengan guru yang memiliki pola pikir yang tidak sesuai visi misi madrasah. Menyamakan visi misi bukanlah hal mudah. Menghadapi beberapa karakter guru yang sudah lama mengajar pada pola pikir mereka lebih sulit lagi. Mulai dari sikap pribadi, pelayanan terhadap siswa, orang tua dan masyarakat menjadi lahan garapan Kepala Madrasah. Dalam hal ini Kepala Madrasah melakukan pendekatan personal. Dengan pendekatan personal ini maka solusi yang dipilih pun menjadi sangat bervariasi. Dari sini Kepala Madrasah berinovasi untuk bisa menciptakan sebuah sistem yang akan mengatur profesionalitas guru didalamnya. Hingga kemudian terciptalah aturan kepegawaian MI Muhammadiyah Program Khusus Kateguhan. Dengan adanya aturan kepegawaian ini semua dapat lebih mudah dikondisikan.

Dalam meningkatkan potensi guru, Kepala Madrasah bersikap terbuka pada guru yang memiliki potensi-potensi unggul. Seperti misalnya memberikan kesempatan pada guru olahraga untuk melakukan pelatihan sepakbola. Guru Hisbul Wathan (HW) untuk melakukan kegiatan perkemahan. Guru-guru lain diberi kesempatan untuk mengembangkan diri dan diberikan fasilitas dari madrasah. Kegiatan pengembangan diri yang dilakukan antara lain studi banding, mengikuti seminar-seminar, memberikan suport lomba-lomba.

Untuk memwadahi peningkatan potensi guru, Kepala Madrasah memberikan wadah berupa *Teacher Study Club* yang diadakan setiap hari Sabtu minggu keempat. Kegiatan ini khusus untuk guru belajar tentang apapun. Materi bisa ditentukan sendiri oleh para guru. Pemateri adalah teman-teman antar guru sendiri. *Teacher Study Club* ini sangat bermanfaat bagi guru. Bisa dimanfaatkan untuk saling *sharing*. Dengan cara ini semua akan saling membesarkan satu sama lain.

Tugas Kepala madrasah sebagai leader dan manager dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan semua elemen di sekolah. Kepala madrasah memiliki jadwal

koordinasi rutin. Diantaranya adalah koordinasi kelas terjadwal dari hari Senin sampai Kamis dari pukul 08.00 WIB sampai 09.00 WIB. Pada hari yang sama kepala madrasah mengadakan koordinasi dengan waka pada pukul 13.00 WIB sampai 14.00 WIB. Kesempatan berkoordinasi ini digunakan untuk melakukan cek dan ricek tentang program kerja masing-masing bidang.

2). Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Siswa

- a. Memahami perjalanan roda madrasah pada poin input, proses, dan output;
- b. Input : Melakukan sosialisasi PPDB dengan berbagai variasi kegiatan;
- c. Proses : Memberikan pelayanan maksimal pada siswa, baik harian (makan, ibadah, belajar, kepribadian);
- d. Output : Unggul dalam pencapaian hasil lulusan.

3). Pengelolaan Wali Murid

- a. Memandang kekuatan wali murid sebagai potensi yang bisa dikembangkan;
- b. Menggandeng wali murid untuk bekerja sama;
- c. Memberikan ruang pada wali murid di forsil;
- d. Melibatkan wali murid dalam kegiatan-kegiatan sekolah yang butuh pendampingan.

4). Pengelolaan Keuangan

- a. Pendanaan adalah salah satu komponen pendukung;
- b. Menjadikan satu pintu keuangan yang semula terdapat sebanyak pintu;
- c. Memberikan pelayan prima pada layanan administrasi sekolah.

5). Pengelolaan Potensi Masyarakat

- a. Eksistensi adalah kekuatan untuk meraih simpati masyarakat;
- b. Berperan dalam kegiatan kemasyarakatan;
- c. Menggandeng potensi masyarakat untuk pengembangan madrasah dalam pembangun gedung baru;
- d. Membentuk team pengembang;
- e. Bantuan-bantuan berupa finansial.

#### **D. KESIMPULAN**

Pendidikan berbasis masyarakat merupakan pendidikan yang mengikutsertakan masyarakat dalam proses pendidikan dan pengelolaan lembaga pendidikan. Dengan demikian konsep pendidikan berbasis masyarakat mencakup dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Seperti halnya yang terjadi di MI Muhammadiyah Program Khusus Kateguhan dimana pada tahun 2007 mengalami kemunduran atau kegagalan suatu program karena tidak adanya persamaan visi dan misi dalam internal sekolah. Keterlibatan masyarakat dalam hal ini yang berfungsi sebagai pengelola madrasah yaitu yayasan tidak tinggal diam dan berusaha keras untuk mempertahankan kelangsungan madrasah dengan berbagai macam cara dilakukan untuk memberikan nafas baru bagi madrasah, yang salah satunya dengan melakukan penambahan nama “Program Khusus” pada nama madrasah yang tentunya diimbangi dengan perubahan mindset tenaga pendidiknya.

Keberadaan MI Muhammadiyah Program Khusus Kateguhan saat ini sangat dirasakan oleh masyarakat baik masyarakat sekitar pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

### Daftar Pustaka

- A.S.Nasution, *Asas-Asas Kurikulum: Teori dan Praktek*. Bandung: Jemars, 1990.
- A.S.Haris, *Pengembangan Sekolah Melalui Partisipasi Masyarakat: Sebuah Kajian Operasional Tingkat Sekolah*. (Seminar Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta), 19 Mei 2001.
- Bagong Suyanto, *Pendidikan Berbasis Masyarakat: Prasyarat yang Dibutuhkan Edukasi*, Vol I, No 1. 2005.
- Dean Nielsen, *Memetakan Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat di Indonesia* Yogyakarta: Adicita Karyanusa, 2001.
- H.A.R Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta : Rineka Cipta, 2000.
- Hermawan, Yudan, and Yoyon Suryono. "Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Program Progam Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Ngudi Kapinteran." *JPPM (Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaam Masyarakat)* 3 No. (2016): 97-108.
- Hidayat, Rhamat. "Pendididkan Berbasis Masyarakat." *Jurnal Attarbiya* 1, no.1 2004
- Ibtisam Abu Dhou, *Menejemen Berbasis Sekolah*, ter Nur Yamin Aini dan Suparto Jakarta : PT Logos Wacana Ilmu, 2002.
- Sanapiah Faisal, *Sosiologi Pendidikan*. Surabaya : Usaha Nasional, 1980.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)*. Alfabeta, 2008.
- Suharto, Toto. *Pendidikan Berbasis Masyarakat; Relasi Negara dan Masyarakat dalam Pendidikan*. LKIS Pelangi Aksara, 2012.
- Umberto Sihombing, *Konsep dan Pengembangan Pendidikan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta : Adicita Karya Nusa, 2001.